

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk hidup yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (*social need*) yang diperlukan manusia untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Hal tersebut didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Misalnya, orangkaya cenderung berteman dengan orang kaya.

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tersebut membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi disini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya. Maksudnya, setiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Potensi yang ada dalam diri manusia itu hanya

mungkin berkembang bila ia hidup dan belajar di tengah-tengah manusia. Untuk bisa berjalan saja manusia harus belajar dari manusia lainnya.

Di dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia yang selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi. Di dalam kehidupan manusia selanjutnya, ia selalu hidup sebagai warga suatu kesatuan hidup, warga masyarakat, dan warga negara. Hidup dalam hubungan antaraksi dan interdependensi itu mengandung konsekuensi-konsekuensi sosial baik dalam arti positif maupun negatif. Keadaan positif dan negatif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia bahkan pertentangan yang diakibatkan oleh interaksi antar-individu. Tiap-tiap pribadi harus rela mengorbankan hak-hak pribadi demi kepentingan bersama. Dalam rangka ini, dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Manusia juga mempunyai perasaan emosional yang ingin diungkapkan kepada orang lain dan mendapat tanggapan emosional dari orang lain pula. Manusia memerlukan pengertian, kasih sayang, harga diri pengakuan, dan berbagai rasa emosional lainnya. Tanggapan emosional tersebut hanya dapat diperoleh apabila manusia dengan orang lain dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat.

Pada umumnya manusia selalu melakukan berhubungan dan berinteraksidengan manusia lain dan tentunya tidak lepas dari konflik sosial yang

terjadi akibat interaksi tersebut, yang dikarenakan adanya pertentangan-pertentangan yang terjadi antara individu atau anggota masyarakat.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Manusia perlu bekerjasama dan membentuk pengelompokan sosial dalam upaya mempertahankan kehidupannya. Dalam kehidupannya itu manusia juga memerlukan organisasi yaitu jaringan informasi sosial antara sesama untuk menciptakan ketertiban sosial. Dalam berinteraksi terkadang timbul konflik dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan karena berbedanya karakter masyarakat itu sendiri, pola hidup, dan cara pencapaian tujuan hidupnya.

Banyak hal yang terjadi di masyarakat yang pada akhirnya berakhir menjadi suatu konflik, baik itu konflik antar individu maupun antar kelompok. Penyebab-penyebab konflik sosial itu sendiri beranekaragam dari hal yang seharusnya tidak menjadi konflik di masyarakat lain namun menjadi konflik di suatu masyarakat atau sebaliknya. Dengan begitu maka kita mesti mengetahui apa dan bagaimana konflik bisa terjadi. Karena sumber konflik itu sendiri sangat beragam dan terkadang bersifat tidak rasional.

Kehadiran manusia lain sangat mutlak diperlukan untuk melestarikan hidupnya, sebab manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa dibantu orang lain. Jadi, dalam medan sosial individu selalu berkomunikasi dan saling memberikan pengaruhnya kepada individu lain, ditengah kelompoknya. Maka, kepemimpinan

merupakan gejala interaksional dalam struktur organisasi yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki tujuan-tujuan bersama.

Di dalam sebuah komunitas manusia yang besar, terutama di dalam negara modern, pertikaian politik dilancarkan antara organisasi-organisasi. Organisasi-organisasi ini adalah kelompok yang berstruktur, dengan kemampuan artikulasi, dan hirarkis, terutama terlatih bagi perjuangan merebut kekuasaan.

Hakikat organisatoris dari kekuatan-kekuatan sosial ini adalah fakta yang fundamental dari kehidupan politik masa kini. Tentu saja, ada selalu sejumlah organisasi kekuatan-kekuatan sosial yang bersungguh-sungguh pada aksi politik, akan tetapi selama seratus tahun terakhir, teknik organisasi kolektif dan metode memasukkan orang ke dalam kelompok aksi kolektif telah sangat disempurnakan. Wajah yang sungguh asli dari perjuangan politik sekarang bukanlah bahwa dia terjadi antar organisasi, akan tetapi karena organisasi ini begitu rapi dikembangkan.

Tingkat kesatuan politik yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat pada hakikatnya mencerminkan kaitan antara lembaga politik dan kekuatan-kekuatan sosial yang membentuknya. Organisasi politik juga merupakan suatu sarana peraturan untuk mempertahankan tata, menyelesaikan perselisihan, memilih tokoh-tokoh pimpinan yang memiliki wibawa sehingga dengan demikian berarti pula menciptakan persatuan dan kesatuan sosial atau lebih. Jadi, komunitas itu memiliki persatuan dan kesatuan solidaritas. Tetapi, apabila struktur masyarakat semakin kompleks dan

majemuk, maka upaya pembinaan komunitas politik akan semakin tergantung pula dari sepak terjang lembaga-lembaga politik.

Menurut Robert A. Dahl (1978), ilmu politik adalah sudah barang tentu pelajaran tentang siasat, atau lebih baik pula dikatakan, hal ini sebagai pelajaran terinci dari berbagai cara yaitu usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih luas.

Secara historis, lembaga politik terbentuk sebagai hasil interaksi dan akibat konflik yang terjadi antara berbagai kekuatan sosial, maupun karena perkembangan tahap demi tahap berbagai prosedur dan sarana yang diperlukan untuk mengatasi konflik tersebut. Disamping hal tersebut, politik juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Seperti halnya terjadi dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) berlangsung bahkan pasca pemilihan desa pun dapat terjadi konflik. Meskipun kemenangan dalam pilkades itu sudah *finish* atau sudah jelas siapa yang memiliki suara terbanyak. Namun, tidak menutup kemungkinan konflik selalu terjadi.

Selain memberi harapan baru bagi berkembangnya demokrasi di tingkat Desa, pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara langsung juga rawan akan konflik. Di media elektronik banyak berita menyorot seputar terjadinya konflik dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa maupun Kepala Daerah. Sengketa yang paling banyak terjadi dalam konflik saat pemilihan kepala desa adalah permasalahan adanya dugaan manipulasi hasil rekapitulasi perhitungan suara. Sengketa lainnya menyorot masalah perilaku pemilih, baik yang tidak terdaftar yang diklaim sebagai pemilih

potensi, tingginya politik uang juga menjadi isu yang banyak diangkat tim sukses yang kalah dalam bersaing.

Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa. Pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa. Hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan yang kondusif.

Namun dalam praktiknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk

ingin berebut kekuasaan daripada hakikat yang diinginkan saat pelaksanaan pilkades adalah pemerintahan desa yang *legitimate* (benar). Saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Sukatani, Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, tidak lepas dari budaya yang dimiliki oleh desa tersebut. Di mana, di Desa Sukatani adalah desa yang homogen. Hal tersebut dikarenakan, di desa tersebut hanya terdapat satu dominasi pemeluk agama, yakni Agama Islam, dan etnis Sunda. Namun, meskipun terdapat keseragaman dalam hal agama dan etnis, dalam masalah sosial, konflik kerap kali terdapat sebagai contoh dalam pemilihan kepala desa di Desa Sukatani ini, terjadi kericuhan yang mengakibatkan konflik yang serius. Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya.

Dalam hal ini, calon kandidat kepala desa tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Pada kenyataannya, aksi tim sukses dari kedua belah pihak atau calon kandidat kepala desa-lah yang melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam demokrasi pilkada. Hal tersebut, disebabkan karena anggota tim sukses dari calon kandidat merupakan warga dari lain wilayah calon kandidat tersebut. Setelah pilkada berlangsung, calon kandidat yang kalah dalam pemilihan merasa kecewa dengan aksi dari tim sukses dan warga yang memilih.

Pasca pemilihan kepala desa, aksi dari tim sukses kandidat berdampak serius pada keseharian masyarakat di Desa Sukatani. Di antaranya, seperti pada seperti

shalat Jum'at, warga memilih untuk melaksanakan ibadah di tempat lain daripada di daerah mereka sendiri. Untuk kegiatan pada saat bulan Ramadhan, pengadaaan zakat fitrah dipisah dengan warga lainnya, qurban saat Idul Adha pun turut dipisah.

Saat pembangunan sebuah masjid agung, sebelum terjadi pemilihan kepala desa, masyarakat setempat bekerja sama dan bergotong royong untuk mambangun masjid tersebut. Setelah terjadi konflik, pembangunan menjadi terkendala disebabkan karena masyarakat yang satu sama lain bertentangan. Adapun dampak lain dari konflik tersebut adalah adanya pengggugatan tanah wakaf dari salah saudara calon kandidat yang jika saat pemilihan saudaranya tersebut tidak menang, maka tanah wakaf tersebut harus diserahkan kembali menjadi milik pribadinya sendiri. Contoh lain yang lebih krusial adalah silaturahmi antar masyarakat yang tidak terjalin dengan baik pasca pemilihan kepala desa. Warga lebih cenderung acuh karena berasal dari tim sukses yang berbeda.

Penyelesaian konflik pemilihan kepala desa dapat diselesaikan dengan cara persuasif yaitu dengan mengedepankan perundingan atau musyawarah untuk mencari titik tengah antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Cara persuasif tersebut dapat ditempuh dengan jalur mediasi. Jalur yang dengan cara menggunakan mediator yang bersikap netral terhadap konflik yang sedang terjadi dan bukan dari salah satu tim sukses calon kandidat guna mengurangi hasil mediasi yang memberatkan salah satu pihak.

kegiatan yang dilakukan menjadi terhambat akibat adanya konflik tersebut.. Berkenaan dengan latar belakang diatas, hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai konflik sosial yang terjadi padapasca pemilihan kepala desa yang penulis tuangkan dalam judul”**KONFLIK SOSIAL PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah yang teridentifikasi pada penelitian ini adalah:

1. Adanya konflik antara pemerintahan desa dengan masyarakat, konflik antara kandidat kepala desa yang kalah dengan tim sukses kandidat lain, dan konflik antara calon kandidat kalah dengan keluarga.
2. Konflik itu mengakibatkan perpecahan antara masyarakat, berdampak pada pembangunan infrastruktur keagamaan pembangunan masjid yang hampir tertunda selama dua tahun dan kegiatan keagamaan.
3. Konflik itu terselesaikan oleh Ketua RT. 01 dengan cara mediasi atau mengumpulkan seluruh RT untuk musyawarah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk tercapainya atau terpenuhinya suatu penelitian yang sistematis dan memenuhi kriteria ilmiah, maka

masalah yang ada harus dirumuskan terlebih dahulu, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya konflik sosial pasca Pilkades di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial pasca Pilkades di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut?
3. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian konflik yang terjadi pasca Pilkades di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik sosial pasca Pilkades di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut adalah untuk mengetahui:

1. Latar belakang terjadinya konflik sosial pasca Pilkades di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut.
2. Dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial pasca Pilkades di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut.
3. Langkah-langkah penyelesaian konflik yang dilakukan pasca Pilkades di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama berkaitan dengan sebagian dari kajian teori konflik. Terutama wawasan, informasi serta pengetahuan mengenai masyarakat yang masih mengalami kejadian konflik di wilayahnya, supaya menjadi perubahan terhadap masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang mempunyai integritas tinggi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna dalam mengambil kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat desa setempat, serta diharapkan dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan mengenai bagaimana Pilkades dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang berlaku, agar tidak menimbulkan konflik sosial pada masyarakat desa setempat.

1.5. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang menuntut segala earga negara agar dapat menentukan dan bebas memilih dalam hal Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Kepala Desa. Namun, tidak sedikit yang dalam proses pemilihan ataupun pasca pemilihan tersebut terdapat

beberapa masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut Soekanto, (1990: 357) masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan-persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak.

Dalam mengkaji sebuah konflik sosial diperlukan adanya sebuah teori. Teori untuk mengkaji konflik sosial adalah teori konflik. Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. "Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak". (Raho, 2007:54).

Teori konflik ini bertujuan untuk menganalisis asal usul suatu kejadian. Terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik di sini menekankan dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang dapat melayani kepentingan-kepentingan mereka.

Teori konflik adalah suatu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Di mana komponen

yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Teori konflik melihat masyarakat sebagai suatu sistem persaingan kelompok, yang menggambarkan perjuangan untuk memperoleh sumber-sumber bagi kebutuhan materi yang mendasar. (Haryanto dan Nugroho, 2011: 113).

Masalah sosial adalah suatu kondisi atau proses dalam masyarakat yang dilihat dari suatu sudut yang tidak diinginkan. Sedangkan menurut Kartono (1992: 1) masalah sosial merupakan semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).

Ada beberapa model konflik umum yang dapat dijadikan inti analisis untuk menggambarkan kondisi masing-masing pihak yang sedang berkonflik. Konflik organisasi sebagai perbenturan yang muncul kala perilaku mencapai tujuan tertentu yang ditunjukkan suatu kelompok dirintangi atau digagalkan oleh tujuan kelompok lain. Karena tujuan, pilihan, dan kepentingan kelompok-kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) di dalam organisasi berbeda maka konflik adalah suatu yang tidak terelakkan di setiap organisasi.

Konflik kerap dipandang negatif, sama halnya dengan politik, tetapi beberapa jenis konflik justru mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi. Konflik punya kontribusi positif karena mengungkap kelemahan suatu organisasi sehingga membuka jalan dalam upaya mengatasinya. Dengan demikian,

konflik membimbing pada proses pembelajaran dan perubahan organisasi. (Jones, 2009: 408-409)

Model berguna untuk menyederhanakan yang interaksi konsep yang rumit. Model didasarkan atas seperangkat konsep yang saling berjaln, atau dianggap saling berjaln, seputar suatu fenomena. Sebab itu, tidak cukup hanya satu model untuk menjelaskan peristiwa, termasuk dalam masalah konflik ini. Di dalam setiap model, untuk menjelaskan masalah konflik, digunakanlah teori. Teori-teori yang memiliki kesamaan kemudian dikelompokkan ke dalam sebuah model.

Konflik juga memiliki beberapa penjelasan dan teori-teori yang berbeda. Dalam jurnal *Organizational Conflict: Concepts and Models*, adalah “*the concept of conflict has been treated as a general sosial phenomenon, with implications for the understanding of conflict within and between organization. Slowly crystallizing out of this research are three conceptual models designed to deal with the major classes of conflict phenomena in organization. The models is: (1) Bargaining model. This is designed to deal with conflict among interest groups in competition for scarce resource. This model is particularly appropriate for the analysis of labor-manajement relations, budgeting process, and staff-line conflict. (2) Bureaucratic model. This is applicable to the analysis of superior-subordinate conflict or, in general, conflict along the vertical dimension of a hierarchy. This model is primarily concerned with the problems caused by institutionnal attemps to control behavior and the organization’s reaction to such control. (3) System model. This is directed at*

lateral conflict, or conflict among the parties to a functional relationship. Analysis of the problem of coordination is the special province of this model.” (Pondy, 1967: 427)

Ketiga model ini punya dimensi penjelasan dan teori-teori yang berbeda dalam menjelaskan konflik.

1. **Model Bargaining** – Model ini didesain untuk menjelaskan konflik yang muncul akibat persaingan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam memperebutkan sumber daya yang langka. Parameter utama guna mengukur konflik-konflik potensial diantara sejumlah kelompok kepentingan adalah dengan mengidentifikasi perbedaan antara tuntutan pihak yang bersaing dengan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks penyusunan anggaran, model ini menjelaskan bahwa konflik dipicu oleh persaingan antar departemen dalam memperebutkan dana organisasi.
2. **Model Birokratik** – Model ini diterapkan guna menjelaskan konflik atasan-bawahan atau, secara umum, konflik di sepanjang garis vertikal dalam hirarki organisasi. Model ini utamanya bicara seputar masalah yang muncul akibat upaya lembaga untuk mengendalikan perilaku dan reaksi pihak-pihak yang dikendalikan tersebut atas organisasi.
3. **Model Sistem** – Model ini bicara tentang konflik lateral, atau konflik antar pihak yang punya fungsi berbeda. Analisis atas masalah koordinasi

dibicarakan secara khusus oleh model ini. Konflik dalam model ini juga dapat terjadi antara orang dengan level hirarki yang sama.

Konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural dan akibat berbagai kritik, yang berasal dari sumber lain seperti teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Asumsi Dahrendorf tentang masyarakat ialah bahwa masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsesus yang dikenal dengan Teori Konflik Dialektika. Dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yakni Teori Konflik dan Teori Konsesus. Teori Konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsesus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat.

Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada

lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain.

Dahrendorf memandang manusia sebagai makhluk abstrak dan artifisial yang dikenal dengan sebutan "*homo sociologious*" dengan itu memiliki dua gambaran tentang manusia yakni citra moral dan citra ilmiah. Citra moral adalah gambaran manusia sebagai makhluk yang unik, integral, dan bebas. Citra ilmiah ialah gambaran manusia sebagai makhluk dengan sekumpulan peranan yang beragam yang sudah ditentukan sebelumnya. Asumsi Dahrendorf, manusia adalah gambaran citra ilmiah sebab sosiologi tidak menjelaskan citra moral, maka manusia berperilaku sesuai perannya maka peranan yang ditentukan oleh posisi sosial seseorang di dalam masyarakat, hal inilah masyarakat yang menolong membentuk manusia, tetapi pada tingkat tertentu manusia membentuk masyarakat. Sebagai *homo sosiologis*, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan peran dan posisi sosialnya tetapi di sisi lain dibatasi juga oleh peran dan posisi sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Lewis Coser dimana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal, sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Menurut Dahrendorf, adanya status sosial

didalam masyarakat menjadi sumber konflik yaitu: adanya benturan kaya-miskin, pejabat-pegawai rendah, majikan-buruh; (2) kepentingan (buruh dan majikan, antar kelompok, antar partai); (3) adanya dominasi, adanya ketidakadilan atau diskriminasi. (4) agama; (5) kekuasaan (penguasa dan dikuasai). Jadi ada perilaku yang ditentukan dan perilaku yang otonom, maka keduanya harus seimbang. Dahrendorf berasumsi bahwa teori fungsionalisme struktural tradisional mengalami kegagalan karena teori ini tidak mampu untuk memahami masalah perubahan sosial, terutama menganalisis masalah konflik.

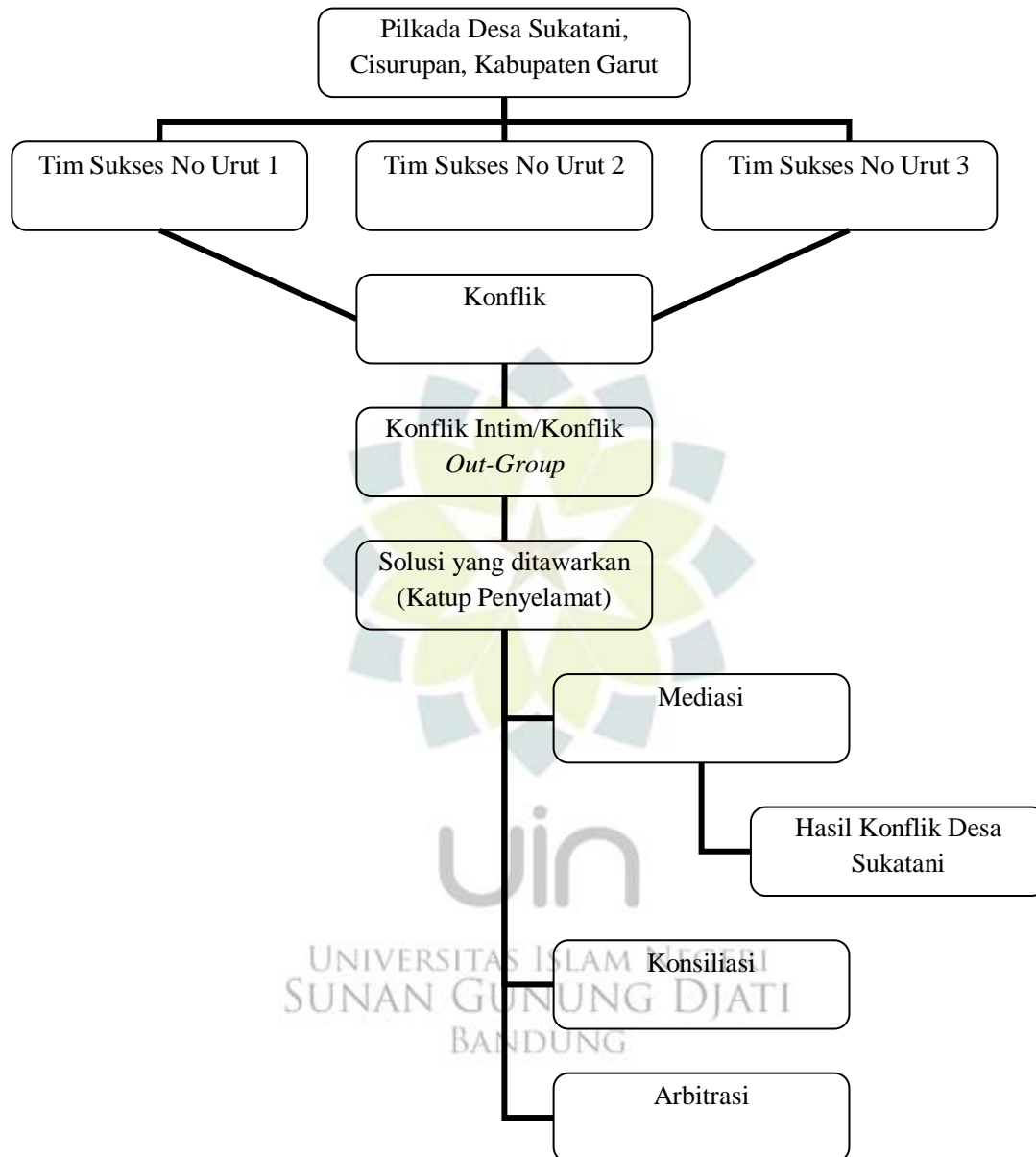
Teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana. Selanjutnya, masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Menurut Lewis A. Coser (Maryati, 2001: 61) konflik merupakan peristiwa normal yang dapat memperkuat struktur hubungan-hubungan sosial. Tidak adanya konflik dalam sebuah masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas hubungan sosial masyarakatnya. Konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda hubungan sosial yang hidup dan dinamis. Sebenarnya, masyarakat yang memperbolehkan terjadinya konflik adalah masyarakat yang cenderung terhindar dari kemungkinan ledakan konflik dan kehancuran struktur sosial.

Lewis A. Coser, melihat katup penyelamat itu sebagai jalan keluar yang dapat meredakan permusuhan antara dua pihak yang berlawanan. Katup tersebut membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur. Katup penyelamat itu menyediakan objek-objek tertentu yang dapat mengalihkan perhatian pihak-pihak yang bertikai agar tersalur ke arah lain. Namun, katup tersebut hanya merupakan sarana yang bersifat sementara. Tujuan utamanya adalah menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul dari situasi pertentangan.

Berdasarkan bentuknya, Lewis A. Coser membedakan konflik atas dua bentuk, yakni konflik realistik dan konflik non-realistis.

1. Konflik realistik berasal dari kekecewaan individu yang terdapat kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial.
2. Konflik non realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistic (berlawanan), melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Dalam masyarakat tradisional, pembalasan dendam lewat ilmu gaib merupakan bentuk konflik nonrealistik. Demikian juga halnya dengan upaya mencari kambing hitam yang sering terjadi dalam masyarakat yang telah maju (Maryati dan Suryana, 2001: 55).

Bagan 1.1**Kerangka Pemikiran Konflik menurut Lewis A. Coser**

Dalam tabel 1.1 sebelumnya penjelasan yang dapat disampaikan adalah bahwa pada konflik sosial pasca pemilihan kepala desa di Desa Sukatani ini diikuti oleh tiga calon kepala desa yang masing-masing dari calon tersebut saling memiliki tim sukses. Tim sukses tersebut bertugas untuk mengambil hati masyarakat guna calon yang diusungnya dapat memenangkan banyak suara pada pemilihan. Konflik sosial yang terjadi di Desa Sukatani tersebut terjadi pasca pemilihan kepala desa, di mana terdapat kekecewaan dari salah satu tim pendukung atau tim sukses terhadap calon yang mendapatkan suara lebih banyak.

Tim sukses dari calon kepala desa nomer urut 1 dan calon kepala desa berserta tim sukses dari nomer urut 3 berkonflik setelah pemilihan kepala desa terjadi. Meskipun surat suara telah disahkan. Dalam konflik yang terjadi di Desa Sukatani tersebut, peneliti menimbang bahwa konflik menurut Lewis A. Coser masuk ke dalam konflik intim atau konflik *out-group*. Konflik *out-group* sendiri menurut Coser adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain. Dalam hal ini adalah kelompok dari calon nomer urut 1 dan calon nomer urut 3.

Pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan terjadinya suatu konflik. Jika konflik sudah terlanjut terjadi, maka harus ada solusi atau cara agar konflik tersebut dapat terhentikan. Lewis A. Coser juga selain mendefinisikan konflik *in-group* dan konflik *out-group*, juga memberikan solusi mengenai penyelesaian dari konflik tersebut. Coser menyebutnya sebagai katup penyelamat. Dalam penyelesaian konflik

terdapat beberapa cara yang biasa digunakan guna mencapai titik akhir dari sebuah konflik. Cara-cara yang digunakan tersebut adalah media, konsiliasi, dan arbitrase.

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sedangkan arbitrase adalah usaha dari perantara dalam meleraikan sengketa atau perselisihan.

Dalam konflik sosial pasca pemilihan kepala desa, solusi yang ditawarkan menurut Lewis A. Coser adalah proses mediasi, di mana pihak ketiga yang ikut dalam penyelesaian konflik di Desa Sukatani ini adalah salah satu dari pihak warga yang tidak ikut berselisih, dengan menyampaikan pilihan-pilihan yang diinginkan masyarakat sekitar wilayah konflik agar mereka dapat merasakan perasaan yang tenang dan nyaman dalam kehidupan dan berkegiatan sehari-hari.

Mediasi yang dilakukan akhirnya dapat memberikan hasil yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak yaitu oleh tim sukses dari calon nomor urut 1 dan tim sukses dari nomor urut 3. Setelah terlaksananya proses mediasi diharapkan tidak menimbulkan masalah baru yang dapat memicu konflik baik yang berskala kecil maupun berskala besar. Pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi pun sepakat untuk menggunakan pilihan-pilihan yang disampaikan ketika proses mediasi berlangsung.